

# **AGRIBISNIS PERKEBUNAN MEMASUKI AWAL ABAD 21: BEBERAPA AGENDA PENTING**

**WAYAN R. SUSILA<sup>\*)</sup> dan BAMBANG DRADJAT<sup>\*\*)</sup>**

Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia, Bogor

## **ABSTRACT**

Estate-crop agribusiness has played and is still expected to play important roles in Indonesian economy. Besides its consistent contribution on economic growth and foreign exchange earning, it provides employment for more than 13 million people. In the beginning of 21<sup>st</sup> century, the estate-crop agribusiness will face various new important agenda and strategic business environment changes related to this subsector, namely, production cost, commodity prices, market competition, trade liberalization, production policies, trade policies, regional autonomy, environmental issues, and plantation plundering. Some of them will depress the development of the subsector in the beginning of 21<sup>st</sup> century, while the others will provide better opportunities for the development of the subsector or their net impacts are still vague. To optimize the roles of the estate-crop subsector agribusiness, various important agenda and strategic business environment changes related to the subsector should be managed in a such way that the negative impacts of the changes can be minimized while the positive and vague impacts can be converted to be a growth engine of the subsector in entering the beginning of 21<sup>th</sup> century.

*Keyword: Estate-Crop Agribusiness, Indonesian Economy, Economic Growth, Foreign Exchange Earning.*

## **ABSTRAK**

Agribisnis perkebunan memegang peranan penting dan tetap diharapkan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Di samping secara konsisten memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan devisa, agribisnis perkebunan kini menyediakan lapangan kerja kepada lebih dari 13 juta penduduk. Memasuki awal abad ke 21, agribisnis perkebunan akan menghadapi berbagai agenda dan perubahan lingkungan bisnis strategis yang mencakup perubahan biaya produksi, harga komoditas perkebunan, peta persaingan, liberalisasi perdagangan, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan, otonomi daerah, isu lingkungan, dan penjarahan. Beberapa faktor tersebut akan memberi tekanan pada pengembangan agribisnis subsektor perkebunan, sedangkan yang lainnya memberi kesempatan yang lebih pada bisnis perkebunan untuk berkembang atau dampak bersihnya belum jelas. Guna mengoptimalkan peran agribisnis perkebunan, berbagai agenda dan perubahan lingkungan strategis tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga dampak negatif dari perubahan tersebut dapat diminimalkan, sedangkan dampak positif ataupun dampak yang belum jelas dapat diubah menjadi mesin pertumbuhan subsektor perkebunan dalam memasuki awal abad ke 21.

*Kata Kunci: Agribisnis Perkebunan, Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Devisa*

---

<sup>\*)</sup> Ahli Peneliti Madya pada Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia, Bogor dan Kandidat Doktor pada Program Pascasarjana, PS. EPN, IPB-Bogor.

<sup>\*\*)</sup> Ahli Peneliti Madya pada Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia, Bogor.

## PENDAHULUAN

Dalam 25 tahun terakhir, subsektor perkebunan merupakan salah satu bisnis strategis dan andalan dalam perekonomian Indonesia, bahkan pada masa krisis ekonomi. Agribisnis subsektor ini mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penerimaan devisa dari ekspor, dan sumber bahan baku bagi industri hilir hasil pertanian. Gula dan minyak goreng dengan bahan baku CPO merupakan kebutuhan pokok dan penentu laju inflasi, suatu indikator ekonomi makro yang selalu mendapat perhatian dan menimbulkan kekhawatiran. Areal dan produksi komoditas perkebunan pada 25 tahun terakhir secara konsisten meningkat, masing-masing dengan laju 4,8 persen dan 5,6 persen per tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan 2000). Devisa yang diperoleh dari ekspor karet, kopi, kakao, minyak sawit, dan teh pada tahun 1999 mencapai lebih dari US\$ 3208 miliar atau sekitar 8,36 persen dari total nilai ekspor non migas (Biro Pusat Statistik 2000). Dengan total areal perkebunan lebih dari 13,4 juta ha (Direktorat Jenderal Perkebunan 2000), jumlah tenaga kerja yang terserap pada subsektor perkebunan diperkirakan mencapai lebih dari 13 juta orang. Karena berbasis pada sumberdaya domestik, komoditas perkebunan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif seperti ditunjukkan oleh Suprihatini *et al.* (1996) untuk teh dan Susila (1998) untuk CPO.

Karena perannya yang demikian strategis baik pada jangka pendek maupun jangka panjang, maka ulasan mengenai perkiraan perubahan lingkungan strategis atau agenda subsektor perkebunan dalam memasuki awal abad ke 21 perlu dicermati. Hal ini disebabkan, agribisnis perkebunan dalam memasuki awal abad ke 21 mengalami berbagai perubahan, baik itu menyangkut aspek teknis, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi baik pada industri hulu dan hilir perkebunan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja subsektor perkebunan. Dari aspek pemasaran, implementasi liberalisasi perdagangan diyakini akan berpengaruh terhadap kinerja perkebunan. Berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pola pengembangan perkebunan dan otonomi daerah tentu akan sangat mewarnai keberhasilan subsektor perkebunan pada masa mendatang. Akhirnya, gema yang semakin kuat terhadap tuntutan perbaikan lingkungan tentu akan berpengaruh terhadap subsektor perkebunan.

Dampak perubahan lingkungan strategis tersebut terhadap subsektor perkebunan tentu perlu dicermati ataupun dianalisis. Dengan analisis tersebut, berbagai pihak yang terlibat dalam agribisnis perkebunan, seperti produsen/petani, pedagang, dan pemerintah, dapat mengambil langkah-langkah antisipatif guna mengembangkan subsektor perkebunan secara optimal. Dengan demikian alokasi sumberdaya pada subsektor perkebunan dapat berjalan

secara efisien, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat perkebunan dapat dicapai secara optimal.

### PERKEMBANGAN SUBSEKTOR PERKEBUNAN INDONESIA

Pada 25 tahun terakhir, subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan paling konsisten, baik ditinjau dari areal, produksi, maupun ekspor. Pada periode tersebut, areal perkebunan meningkat dengan laju 3,89 persen per tahun, sedangkan pada dekade terakhir (1989-1999), areal meningkat dengan laju 3,56 persen per tahun (Tabel 1). Dari beberapa komoditas perkebunan yang penting di Indonesia (karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan tebu), kakao dan kelapa sawit tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Pada 25 tahun terakhir (1974-1999) areal kakao dan kelapa sawit masing-masing tumbuh laju 14,58 persen dan 11,83 persen. Pertumbuhan yang pesat dari kedua komoditas tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui program PIR untuk kelapa sawit dan program P2WK untuk kakao. Walaupun ada program PIR untuk karet, kontribusi program tersebut terhadap areal relatif kecil sehingga areal karet secara agregat hanya tumbuh dengan laju 1,83 persen per tahun.

Tabel 1. Perkembangan Areal Tanaman Perkebunan

Komoditas	Areal tahun 1999 (ribu ha)	Pangsa areal (%)	Pertumbuhan (1974-1999), % per tahun	Pertumbuhan (1989-1999), % per tahun
Karet	3662	25,3	1,83	1,83
Kelapa sawit	2975	20,5	11,83	11,82
Kelapa	3712	25,6	2,28	1,34
Kopi	1158	8,0	4,49	1,11
Kakao	528	3,6	14,58	5,21
Teh	420	2,9	1,34	1,21
Lainnya	2046	14,1	5,76	2,75
Total	14501	100,0	3,89	3,56

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2000)

Sejalan dengan pertumbuhan areal, produksi perkebunan juga meningkat dengan konsisten dengan laju 5,90 persen per tahun dalam 25 tahun terakhir atau 7,09 persen pada dekade terakhir (Tabel 2). Pada tahun 1974, volume produksi subsektor perkebunan adalah sekitar 4.154 juta ton, sedangkan tahun 1999 volume produksi sudah mencapai sekitar 17.424 juta ton. Seperti juga areal, pertumbuhan produksi tercepat dicapai oleh tanaman kakao dengan laju 22,01 persen per

tahun. Pertumbuhan tercepat kedua dicapai oleh kelapa sawit dengan laju peningkatan produksi sekitar 12,06 persen per tahun. Perkembangan produksi tanaman lainnya berkisar antara 0,5-5 persen, kecuali tanaman tebu yang mengalami penurunan produksi dengan laju penurunan -0,45 persen per tahun. Penurunan produksi gula disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal seperti penurunan produktivitas dan bias kebijakan pemerintah, maupun pasar gula internasional yang sangat distortif sehingga harga gula terus mengalami penurunan (Susila dan Susmiadi 2000).

Tabel 2. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas	Produksi tahun 1999 (ribu ton)	Pangsa produksi (%)	Pertumbuhan (1974-1999), % per tahun	Pertumbuhan (1989-1999), % per tahun
Karet	1714	9,8	3,01	3,56
Kelapa sawit	5989	34,4	12,06	11,79
Kelapa	2778	15,9	2,95	2,26
Kopi	466	2,7	4,64	1,50
Kakao	461	2,7	22,01	15,36
Teh	154	0,9	0,52	0,88
Lainnya	4492	25,8	5,81	7,92
Total	17424	100,0	5,90	7,09

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2000)

Secara umum, laju pertumbuhan konsumsi dalam negeri relatif lambat, kecuali konsumsi domestik CPO yang tumbuh dengan pesat dengan laju sekitar 9,23 persen per tahun pada dekade terakhir. Lambatnya laju konsumsi domestik adalah indikasi bahwa industri hilir perkebunan belum berkembang karena menyangkiut masalah teknologi, hambatan pasar (*entry barrier*), dukungan kebijakan yang belum optimal, serta jiwa kewirausahaan yang belum berkembang (Said 2000, Darmawan 2000, serta Karseno 2000).

Produk tanaman perkebunan umumnya berorientasi ekspor dimana lebih dari 50,0 persen produksi, kecuali gula, adalah diekspor. Sebagai contoh, proporsi produksi dari kopi dan karet yang diekspor pada tahun 1999 masing-masing adalah 68,74 persen dan 96,13 persen. Kinerja ekspor komoditas perkebunan Indonesia juga tumbuh dengan relatif stabil walau dukungan kebijakan ekspor belum maksimal. Pada tahun 1974, volume ekspor diperkirakan baru mencapai sekitar 1.520 juta ton dan meningkat menjadi 4.293 juta ton pada tahun 1999, atau mengalami pertumbuhan 4,20 persen per tahun (Tabel 3). Dari segi nilai, ekspor komoditas perkebunan meningkat 6,52 persen per tahun yang menunjukkan bahwa nilai ekspor berkembang lebih cepat dari volume ekspor. Namun dalam dekade terakhir,

fenomena ini berbalik dimana volume berkembang lebih cepat dibandingkan dengan nilai. Hal ini memberi indikasi adanya kecenderungan melemahnya harga komoditas perkebunan primer Indonesia di pasar internasional.

Dari sisi volume, CPO mempunyai pangsa ekspor terbesar yang mencapai 1.479 juta ton pada tahun 1999 atau sekitar 41,07 persen dari volume ekspor. Lebih jauh, ekspor CPO dalam satu dekade terakhir juga tumbuh relatif pesat dengan laju 5,66 persen per tahun. Dengan pangsa 7,87 persen dari volume, ekspor kakao juga mengalami pertumbuhan yang tinggi dengan laju pertumbuhan 10,84 persen per tahun. Kecuali gula, ekspor komoditas lainnya mengalami pertumbuhan berkisar antara 3,13-11,94 persen pada 25 tahun terakhir.

Kebijakan ekspor yang berkaitan dengan komoditas perkebunan lebih banyak ditekankan pada ekspor CPO. Sebelum Juni 1991, pemerintah mengambil kebijakan untuk memprioritaskan pemenuhan konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan alokasi ekspor adalah sekitar 30 persen terhadap total produksi. Pada Bulan Juni 1991, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang dikenal sebagai Pakjun 1991. Salah satu esensi dari kebijakan itu adalah liberalisasi perdagangan CPO dan produk turunannya. Sebagai akibatnya, ekspor CPO melonjak pesat khususnya sejak tahun 1993 dan pasokan untuk pasar domestik mulai terhambat. Untuk mengatasi hal ini, mulai 31 Agustus 1994 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan pajak ekspor (SK Menkeu No. 439/KMK.017/1994) untuk menghambat ekspor sekaligus memelihara stabilitas pasokan CPO di pasar domestik. Nilai efektif dari pajak ekspor tersebut adalah antara 10-12 persen dari nilai ekspor. Dengan kebijakan Menteri Keuangan No. 300/KMK.01/1997 tertanggal 4 Juli 1997, pemerintah lebih menyederhanakan/menurunkan pajak ekspor CPO menjadi 5 persen. Selanjutnya, pemerintah membekukan ekspor CPO untuk periode Januari-Maret 1998, sebelumnya akhirnya diganti dengan pajak ekspor sebesar 40 persen dan kemudian menjadi 60 persen. Secara bertahap pajak ekspor terus diturunkan dan kini hanya 5 persen.

Walaupun impor komoditas primer perkebunan Indonesia terus meningkat, volume dan nilainya relatif masih kecil, kecuali impor gula. Sebagai contoh, impor CPO Indonesia meningkat dengan laju 12,04 persen per tahun pada dekade terakhir, dengan volume impor adalah sekitar 350 ribu ton pada tahun 1999 atau sekitar 6,15 persen dari produksi. Secara umum, impor komoditas perkebunan Indonesia relatif masih kecil sehingga belum merupakan pesaing yang signifikan untuk pasar domestik Indonesia.

Tabel 3. Perkembangan Ekspor Komoditas Perkebunan Indonesia

Komoditas	Volume			Nilai		
	1999 (ribu ton)	Pertumbuhan, 1974-1999 (% per tahun)	Pertumbuhan 1989-1999 (%per tahun)	1999 (juta US\$)	Pertumbuhan, 1974-1999 (% per tahun)	Pertumbuhan 1989-1999 (%per tahun)
Karet	1718	3,13	4,08	1247	3,39	2,16
Kelapa Sawit	1479	5,99	5,66	1114	8,14	2,71
Kelapa	721	4,23	4,68	653	13,24	20,81
Kopi	351	4,68	-0,17	459	6,36	-0,72
Kakao	335	25,75	10,84	296	20,07	13,26
Teh	934	11,94	23,33	92	2,79	-5,54
Lainnya	1134	2,75	39,29	350	7,32	1,29
Total	4259	4,20	10,8	4211	6,52	6,58

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2000)  
Biro Pusat Statistik (2000)

Untuk impor, kebijakan tarif impor gula merupakan kebijakan yang paling menimbulkan kontroversi. Berdasarkan SK Menperindag No. 230/MPP/Kep/6/1999, pemerintah mengenakan tarif impor sebesar 20 persen untuk *raw sugar* dan 25 persen untuk *white sugar*. Kebijakan ini memang merupakan kebijakan yang efektif karena kebijakan tersebut membuat laju impor dapat ditekan sekitar 8,4 persen, sedangkan harga domestik meningkat sekitar 11 persen. Pendapatan petani tentunya meningkat, sedangkan pengeluaran konsumen untuk gula menjadi semakin besar (Susila dan Susmiadi 2000).

Secara umum, harga komoditas perkebunan di pasar internasional cenderung mengalami penurunan, khususnya tahun 2000 (Tabel 4). Sebagai contoh, jika harga karet pada 25 tahun terakhir rata-ratanya selalu diatas US\$ 1000/ton, maka harga tahun 2000 hanya US\$ 789/ton. Penurunan harga yang cukup besar juga dialami oleh kelapa sawit, kopi, dan kakao. Secara umum penurunan harga tersebut disebabkan oleh faktor yang kompleks yang antara lain mencakup kelebihan pasokan/produksi di pasar dunia baik karena kenaikan produksi ataupun pelepasan stok, depresiasi mata uang yang cukup besar yang dialami oleh negara produsen, lemahnya organisasi lembaga produsen, serta faktor sentimen pasar yang cenderung menekan secara terus menerus harga produk perkebunan.

Tabel 4. Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan di Pasar Internasional (US\$/ton)

Komoditas	Rata-rata harga tahun 2000	Rata-rata harga (1975-2000)	Rata-rata harga (1990-2000)
Karet	789.40	1091.26	1070.04
Kelapa sawit	310.95	445.38	459.19
Kopi	2069.40	3197.92	2475.20
Kakao	815.15	1525.93	1237.07
Gula	172.61	222.82	226.05

Sumber: Bank Indonesia ( 2000)

Seperti kebanyakan komoditas pertanian, harga produk perkebunan primer mengalami fluktuasi yang cukup tajam di pasar internasional. Hal ini tercermin dari nilai koefisien keragaman harga tahunan yang cukup tinggi yaitu antara 18 persen untuk karet sampai dengan 42 persen untuk teh (Tabel 5). Fluktuasi harga ini berkaitan dengan Fluktuasi harga di pasar internasional yang ada hubungannya dengan faktor siklus biologis tanaman khususnya untuk tanaman keras, iklim, kondisi ekonomi, dan harapan harga (*expected prices*).

Faktor teknis yang berkaitan erat dengan faktor ekonomis lebih banyak berpangkal pada sisi penawaran (*supply side*), seperti faktor musim, penawaran yang tidak elastis, dan fleksibilitas harga. Sebagai produk perkebunan, pengaruh musim sering sangat menentukan penawaran yang pada gilirannya mempengaruhi harga. Pengaruh kekeringan pada tahun 1991 telah menyebabkan terjadinya penurunan produksi pada tahun 1993. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab dari peningkatan harga yang terjadi pada tahun 1994.

Untuk tanaman setahun, pengaruh iklim terutama berkaitan dengan aspek produksi. Sebagai contoh, pada saat musim gugur daun, produksi tanaman karet dapat menurun sampai 50 persen. Sebagai akibatnya, harga cenderung mengalami peningkatan.

Faktor tidak elastisnya penawaran jangka pendek terutama berhubungan dengan faktor biologis tanaman perkebunan yang memerlukan masa belum menghasilkan sekitar antara 3-6 tahun. Kenaikan harga pada suatu periode tidak secara memadai dapat direspon dengan kenaikan produksi karena peningkatan produksi tidak dapat dipacu secara cepat. Kenaikan harga biasanya direspon dengan respon jangka panjang dalam bentuk investasi (perluasan tanaman) yang dampak produksinya baru muncul 4-7 tahun kemudian. Di sisi lain, harga relatif fleksibel terhadap perubahan penawaran. Kelebihan produksi akan secara cepat direspon dengan penurunan harga.

Tabel 5. Koefisien Keragaman Harga komoditas Perkebunan (%)

Komoditas	Harga Komoditas
Karet	28
Kelapa Sawit (CPO)	36
The	42
Kakao	28
Kopi	36

Sumber: Susila (1996)

## AGRIBISNIS PERKEBUNAN MEMASUKI AWAL ABAD 21

Kinerja agribisnis perkebunan dalam memasuki awal abad 21 diperkirakan akan mengalami perubahan, baik karena akumulasi faktor-faktor periode sebelumnya, seperti dampak liberalisasi perdagangan, maupun perubahan lingkungan strategis yang terjadi pada awal abad 21, khususnya tahun 2001. Untuk itu, pada bagian ini secara ringkas akan diuraikan beberapa agenda, faktor, atau lingkungan strategis yang perlu dicermati terkait dengan agribisnis perkebunan memasuki awal abad 21. Hal-hal tersebut mencakup biaya produksi, harga komoditas perkebunan, liberalisasi perdagangan, peta persaingan, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan, kebijakan fiskal, otonomi daerah, isu lingkungan, dan penjarahan.

### Biaya Produksi

Walaupun teknologi terus berkembang, kecenderungan kenaikan biaya produksi (harga pokok) merupakan sesuatu yang masih sulit dihindarkan. Tergantung pada komoditas serta efisiensi perusahaan, biaya produksi terus meningkat sekitar 2-7 persen per tahun. Bahkan, pada periode tertentu ketika terjadi guncangan dalam perekonomian, baik itu besumber dari faktor ekonomi maupun politik, biaya produksi bahkan dapat meningkat di atas 10 persen.

Memasuki awal abad 21, khususnya tahun 2001, ada beberapa sumber yang memungkinkan biaya produksi akan meningkat. Pertama, tekanan kenaikan upah karyawan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan. Pada masa mendatang, ada kecenderungan nasional ataupun global yang mengarah perbaikan secara konsisten kesejahteraan karyawan. Seperti diketahui, komponen biaya upah untuk usaha perkebunan cukup dominan dengan kisaran 25-35 persen dari biaya produksi secara keseluruhan. Kenaikan upah akan secara signifikan menaikkan biaya produksi pada masa mendatang.

Faktor kedua yang menjadi sumber kenaikan biaya produksi adalah input yang dikelola oleh pemerintah atau BUMN. Tekanan kenaikan harga BBM pada masa mendatang tampaknya sulit dihindarkan karena subsidi BBM secara bertahap akan dikurangi. Kenaikan



harga input lainnya sebagai ikutan dari kenaikan harga BBM sulit untuk dikendalikan oleh perusahaan perkebunan. Peningkatan biaya yang bersumber dari energi (listrik) tampaknya juga akan terus dihadapi oleh subsektor perkebunan pada masa mendatang. Walaupun berbagai upaya peningkatan efisiensi terus dilakukan, kenaikan biaya produksi karena faktor tersebut masih sulit untuk dihindarkan.

### **Harga Komoditas Perkebunan di Pasar Internasional**

Memasuki awal abad 21, masalah harga produk primer perkebunan tampaknya tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Harga produk primer perkebunan di pasar internasional yang merupakan pasar utama produk primer perkebunan Indonesia diperkirakan akan masih mengalami tekanan. Sebagai contoh, rata-rata harga karet selama 25 tahun terakhir adalah sekitar US\$ 1,1/kg. Pada tiga tahun terakhir, harga karet mencapai titik terendah, dengan kisaran US\$ cent 0.6-0.7/kg. Hal yang sama juga tampaknya berlaku untuk harga CPO yang pada akhir tahun 2000 berkisar antara US\$ 225-250 per ton. Nasib harga kopi dan kakao juga tidak jauh berbeda. Harga kakao biji dan kopi robusta umumnya di atas US\$ 1/kg, sedangkan kini hanya berkisar antara US\$ 0.6-0.8/kg. Menurunnya harga komoditas perkebunan tersebut tentu merupakan tekanan berat bagi pelaku bisnis perkebunan.

Memasuki awal abad 21, khususnya tahun 2001, harga produk perkebunan diperkirakan lebih tinggi dari harga yang terjadi pada akhir tahun 2000. Hal ini lebih disebabkan oleh faktor psikologis di mana harga-harga produk perkebunan tahun 2000 dianggap sebagai harga titik terendah. Memasuki tahun 2001, harga diperkirakan akan meningkat. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak akan melonjak, kecuali ada penyebab ekstrim, seperti *frost* di Brazil yang dapat meningkatkan harga kopi lebih dari 100 persen. Dengan kenaikan yang bersifat moderat, maka harga komoditas perkebunan akan meningkat tetapi belum mencapai harga *booming*-nya. Sebagai contoh, harga CPO akan bergerak antara US\$ 300-350/ton, sedangkan harga karet adalah sekitar US\$ 700-900/ton.

Masalah kedua yang masih terkait dengan harga adalah bahwa fluktuasi harga produk perkebunan juga masih akan terjadi. Seperti diuraikan sebelumnya, fluktuasi harga komoditas perkebunan sudah merupakan ciri dari pasar komoditas tersebut. Penyebab fluktuasi harga bersifat kompleks yang menyangkut faktor alam (iklim), biologis (masa tanaman belum menghasilkan yang lama) sehingga penawaran jangka pendek menjadi tidak elastis. Ditambah dengan sisi permintaan yang juga tidak elastis, maka fluktuasi harga komoditas perkebunan masih akan menjadi fenomena yang harus disiasati pada masa-masa mendatang.

Dengan koefisien keragaman harga kopi, teh, dan CPO yang berkisar antara 28-42 persen (Tabel 6), pengelola agribisnis perkebunan dituntut memiliki kiat yang tepat untuk mengatasi/mengurangi akibat dari fluktuasi harga.

### Peta Persaingan

Memasuki awal abad 21, peta persaingan perdagangan komoditas perkebunan tampaknya tidak akan mengalami perubahan yang berarti. Gambaran umum peta persaingan komoditas perkebunan secara garis besar disajikan pada Tabel 2. Dari tabel tersebut tampak bahwa Indonesia masih memegang peranan yang cukup penting dalam perdagangan beberapa komoditas perkebunan. Untuk karet, posisi Indonesia adalah nomor dua setelah Thailand. Negara pesaing lainnya adalah Malaysia yang sekarang menduduki posisi ketiga. Indonesia lebih banyak menguasai pasar Amerika, sedangkan Thailand menguasai pasar Jepang dan Eropa. Untuk Malaysia, pasar utamanya adalah Eropa Barat.

Persaingan dalam perdagangan CPO sebenarnya hanya terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Nigeria sebagai produsen nomor tiga lebih banyak mengalokasikan produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Malaysia yang merupakan produsen dan eksportir terbesar akhir-akhir ini berusaha secara konsisten mengolah minyak sawitnya sehingga volume ekspor dalam bentuk minyak sawit diperkirakan akan mulai tertahan. Keterbatasan lahan yang sesuai serta tingginya upah, juga akan menahan perluasan areal di Malaysia sehingga akan memperlambat laju ekspor.

Tabel 7. Peta Persaingan Komoditas Perkebunan

Komoditas	Posisi Indonesia		Negara Pesaing	Tujuan Ekspor
	Produksi	Ekspor		
Karet	2	2	Malaysia, Thailand	USA, EC, Jepang, Cina Korea, India
Minyak Sawit	2	2	Malaysia, Nigeria	Cina, EC, Pakistan, Singapura Mesir, Korea
Kakao	3	3	Pantai Gading, Ghana Brazil	USA, EC, FSU
Kopi	3	3	Brazil, Columbia, Vietnam Pantai Gading, India	USA, Jepang, EC, Brazil Australia, Cina
Teh	5	5	India, Kenya, Sri Lanka	EC, FSU, USA, Timur Tengah

Sumber: Sultoni dan Susila, 1998

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara produsen dan eksportir terbesar kedua mempunyai peluang untuk meningkatkan eksportnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang paling efisien dalam memproduksi minyak sawit sehingga CPO Indonesia sangat kompetitif di pasar internasional. Dengan ketersediaan lahannya yang relatif luas, Indonesia berpeluang untuk meningkatkan produksi sehingga memacu pertumbuhan ekspor. Namun demikian, karena tingkat konsumsi dalam negeri masih meningkat pesat, laju peningkatan ekspor tampaknya juga agak terhambat.

Untuk kakao, posisi Indonesia adalah nomor tiga setelah Pantai Gading dan Brazil. Dalam persaingan di pasar internasional, masalah yang dihadapi Indonesia adalah masalah mutu. Karena masalah tersebut, Indonesia dikenakan *automatic detention* yaitu potongan harga secara otomatis terhadap kakao Indonesia yang besarnya adalah sekitar US\$ 50 per ton.

Seperti juga kakao, peta persaingan kopi relatif sama di mana Brazil dan Columbia merupakan dua negara terbesar dalam perdagangan kopi. Untuk kopi robusta, saingan utama Indonesia adalah Vietnam. Indonesia kembali menghadapi masalah mutu di mana mutu ekspor Indonesia didominasi oleh mutu kelas IV. Di samping itu, jenis kopi Indonesia yaitu robusta umumnya memperoleh harga yang lebih rendah dari kopi lain yang diproduksi oleh Brazil dan Columbia yaitu jenis Arabika.

Peran Indonesia dalam perdagangan teh dunia masih relatif kecil yaitu menduduki posisi nomor lima. Dengan harga yang fluktuatif, peran Indonesia dalam perdagangan teh boleh dikatakan mengalami semacam fase stagnasi di mana nilai ekspor cenderung mengalami penurunan.

Gambaran umum daya saing Indonesia adalah bahwa Indonesia termasuk salah satu produsen yang paling efisien, khususnya sampai di tingkat kebun (*planters*). Daya saingnya mulai menurun ketika produk mulai meninggalkan kebun menuju pelabuhan. Sebagai contoh, biaya pemasaran (transpor, administrasi) untuk perusahaan tertentu dapat mencapai sekitar sekitar 30 persen dari harga pokok FOB.

Sebagai salah satu negara pengekspor komoditas perkebunan, Indonesia diperkirakan mempunyai prospek yang cukup cerah. Dengan perkataan lain, daya saing komoditas perkebunan Indonesia di masa mendatang diperkirakan akan semakin baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal seperti tingkat upah yang kompetitif, ketersediaan lahan yang masih memadai, nilai tukar yang kompetitif, serta berbagai kebijakan deregulasi yang secara terus menerus digulirkan oleh pemerintah dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Faktor eksternal terutama berkaitan dengan

liberalisasi perdagangan yang tampaknya akan menguntungkan Indonesia. Berbagai hambatan tarif dan non-tarif yang selama ini dihadapi Indonesia diperkirakan akan semakin menurun sehingga akan memperkuat daya saing komoditas perkebunan Indonesia di pasar internasional.

### **Organisasi Komoditas Perkebunan Internasional**

Kecenderungan harga yang menurun dan berfluktuasi pada masa mendatang akan semakin sulit dikendalikan karena belum efektifnya kinerja Organisasi Komoditas Perkebunan Indonesia (OKPI) seperti ICO dan ACPC (untuk kopi) INRO dan ANRPC untuk karet, ICCO untuk kakao, dan ISO untuk gula. Sebagai contoh, ketika harga karet terus menurun, manajemen stok penyangga (*buffer stock*) INRO tidak mampu melakukan perannya untuk membeli. Bahkan Indonesia, Thailand, dan Malaysia sebagai pemain utama dalam lembaga tersebut sulit menemukan titik temu untuk mengatasi merosotnya harga karet. Retensi kopi dari ACPC guna menaikkan harga kopi yang kini terus merosot juga tidak berjalan lancar. Indonesia dan Vietnam sebagai eksportir terbesar kopi robusta masih saling menunggu dalam pelaksanaan retensi tersebut.

Beberapa faktor penting yang menghambat efektivitas OKPI adalah sebagai berikut:

1. Ketidakstabilan atau fluktuasi harga perkebunan relatif tinggi, sehingga OKPI sulit untuk dapat menstabilkan harga komoditas tersebut. Dengan koefisien keragaman antara 30-40 persen, adalah menjadi sangat berat bagi OKPI untuk menstabilkan harga pada waktu yang relatif lama.
2. Biaya intervensi OKPI yang tinggi. Berbagai instrumen kebijakan yang diterapkan oleh OKPI memerlukan biaya yang relatif besar yang antara lain menyangkut biaya administrasi, stok/gudang, serta biaya suku bunga. Iuran dari anggota umumnya sulit untuk dapat membiayai seluruh kegiatan lembaga tersebut. Makin tinggi tingkat fluktuasi harga, makin banyak stok yang harus dikendalikan, sehingga makin banyak biaya yang harus disediakan oleh lembaga tersebut. Pada kenyataannya, stok lebih banyak dikuasai oleh pedagang atau negara importir, sehingga pengendalian harga oleh OKPI menjadi kurang efektif.
3. Lemahnya aspek legalitas OKPI. Kelemahan dalam aspek legalitas menyebabkan kelemahan dalam pembiayaan, kontrol, dan penerapan sanksi terhadap anggota yang melanggar kesepakatan. Negara ataupun perwakilan negara yang menjadi anggota sering terlambat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar iuran. Sebagai akibatnya, implementasi dan kontrol terhadap berbagai kebijakan menjadi terhambat. Lebih jauh lagi, organisasi tidak dapat menerapkan sanksi secara tegas terhadap anggota yang melanggar, seperti yang terjadi pada pelanggaran kuota ekspor ataupun retensi.

4. Banyaknya negara sebagai *free rider*. Masalah ini merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi efektivitas kinerja OKPI. Seperti diketahui, banyak negara produsen yang tidak menjadi anggota OKPI. Sebagai contoh, Indonesia belum menjadi anggota ICCO, sedangkan Vietnam belum menjadi anggota ACPC. Sebagai akibatnya, ketika negara anggota telah mengeluarkan banyak sumber daya untuk menstabilkan ataupun meningkatkan harga komoditas tertentu, negara yang bukan anggota ikut menikmati tanpa mengeluarkan biaya. Bahkan, negara non-anggota dapat menetralkan pengaruh kebijakan OKPI. Kasus Indonesia sebagai anggota ACPC dan Vietnam yang bukan anggota dapat menjadi contoh.

### **Liberalisasi Perdagangan**

Liberalisasi perdagangan yang tertuang dalam GATT Putaran Uruguay masih akan mewarnai bisnis perkebunan pada masa mendatang. Seperti diketahui, secara umum ada empat komitmen yang berakitan dengan produk pertanian/perkebunan komitmen pada *domestic support* (bantuan domestik), *market access* (akses pasar), *export subsidy* (subsidi ekspor) dan komitmen *sanitary and phytosanitary measures* (sanitasi dan fitosanitasi).

Memasuki awal abad 21, Indonesia tidak mempunyai kekhawatiran dengan komitmen bantuan domestik. Berbagai bentuk subsidi, seperti subsidi pupuk dan kredit sudah hampir seluruhnya dihapuskan, khususnya untuk tanaman perkebunan. Subsektor perkebunan juga tidak mendapat dukungan harga dalam bentuk harga dasar atau harga minimum.

Terhadap komitmen akses pasar yang mencakup tarififikasi, penurunan tarif, dan akses minimum, Indonesia juga tampaknya tidak akan menghadapi masalah yang berarti. Bahkan untuk kasus gula, Indonesia bahkan menerapkan tarif impor sebesar 25 persen, padahal komitmen *binding tariff*-nya adalah 95 persen. Indonesia pada dasarnya siap menurunkan tarif impor untuk komoditas perkebunan menjadi sekitar 40-60 persen. Hal yang sama juga berlaku untuk subsidi ekspor, karena tidak ada komoditas perkebunan Indonesia yang diekspor dengan subsidi. Untuk kasus ekspor CPO, kebijakan pemerintah Indonesia bahkan sebaliknya yaitu mengenakan pajak ekspor.

Satu-satunya komitmen yang masih menjadi masalah bagi Indonesia adalah komitmen sanitasi dan fitosanitasi. Seperti disepakati, setiap negara diizinkan membuat standar tersendiri yang berkaitan dengan komitmen tersebut, sepanjang tidak berlebihan. Pada kenyataannya, negara-negara importir yang umumnya adalah negara maju sering menggunakan komitmen tersebut untuk menghambat impor produk perkebunan dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi, untuk awal abad 21, tampaknya Indonesia harus berusaha keras untuk dapat mensiasati komitmen tersebut.

## **Kebijakan Produksi**

Memasuki awal abad 21, di antara berbagai kebijakan produksi yang perlu dicermati adalah kebijakan restrukturisasi dalam bidang perkebunan yang pada akhirnya antara lain diwujudkan dengan lima pola pengembangan perkebunan. Kelima pola tersebut dimaksudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan pola sebelumnya, seperti yang terjadi pada pola PIR dan UPP. Kelima pola tersebut adalah pola Koperasi Usaha Perkebunan (KUP), Patungan Koperasi dan Investor, Patungan Investor dan Koperasi, *Built, Operated*, dan *Transfer*, dan pola Bank Tabungan Negara, tertuang dalam SK Menhutbun No. 107/Kpts-II/1999, tanggal 3 Maret 1999 (Pakpahan 1999).

Dalam pelaksanaannya, kelima pola tersebut belum bisa berjalan dengan lancar karena masih banyaknya hambatan yang ditemui, baik oleh investor maupun petani. Agar ke lima pola tersebut dapat terwujud, diperlukan beberapa prasyarat yaitu (i) adanya landasan hukum yang lebih tinggi; (ii) pengembangan koordinasi horisontal mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah; (iii) kehadiran lembaga keuangan alternatif; (iv) lembaga ekonomi petani (koperasi) yang tangguh; (v) adanya lembaga pengawas dan pendamping; dan (vi) masa transisi yang cukup (Herman *et al.* 2000). Kinerja dari subsektor perkebunan awal abad 21 akan sangat bergantung sejauh mana prasyarat-prasyarat tersebut dapat dipenuhi.

## **Kebijakan Perdagangan**

Dukungan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan sering menunjukkan inkonsistensi dengan slogan menjadikan pertanian/perkebunan sebagai sektor prioritas dan lokomotif pembangunan pedesaan. Kebijakan pajak ekspor CPO yang tinggi yang pernah diterapkan pemerintah menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam menempatkan subsektor perkebunan dalam pembangunan nasional. Pembebasan tarif impor gula yang pernah diterapkan pemerintah merupakan contoh lain yang menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam mendukung upaya menempatkan perkebunan sebagai lokomotif pembangunan di Indonesia.

Memasuki awal abad 21, inkonsistensi kebijakan perdagangan tersebut diharapkan berkurang. Indikasi ke arah tersebut antara lain tampak dari upaya pemerintah untuk menurunkan pajak ekspor CPO dan berbagai kebijakan, misalnya kebijakan kredit ketahanan pangan, yang memberi prioritas pada usaha pertanian/perkebunan.

## Otonomi Daerah

Pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 tentunya akan mempunyai pengaruh terhadap kinerja agribisnis perkebunan pada masa mendatang. Ada dua undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yaitu UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya memberi wewenang yang lebih luas pada pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki.

Dengan belum jelasnya operasionalisasi dari otonomi daerah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan subsektor perkebunan, maka pengaruh otonomi daerah terhadap subsektor perkebunan masih memerlukan kajian lebih mendalam. Dampak positif yang diharapkan dari otonomi daerah adalah bahwa inisiatif daerah lebih terpacu sehingga potensi ekonomi daerah, termasuk subsektor perkebunan dapat digali secara optimal. Hal ini cenderung mendorong daerah untuk melakukan spesialisasi guna meningkatkan efisiensi pada semua bidang, termasuk subsektor perkebunan.

Kemungkinan dampak negatif dari otonomi daerah terhadap subsektor perkebunan adalah adanya kompetisi antar daerah dalam mengembangkan subsektor tersebut. Jika tidak ada koordinasi antar daerah atau dari pemerintah pusat, persaingan tersebut dikhawatirkan akan memperlemah posisi rebut tawar Indonesia di pasar internasional. Sebagai contoh, jika beberapa daerah berusaha meningkatkan produksi produk perkebunan sehingga melebihi peluang pasar yang ada, maka kelebihan penawaran (*over supply*) sulit dihindarkan. Sebagai akibatnya, harga turun yang tentunya merugikan produsen perkebunan Indonesia.

Sisi negatif lain yang tampaknya akan berlanjut dihadapi subsektor perkebunan sebagai akibat otonomi daerah adalah meningkatnya jumlah pungutan, retribusi, ataupun sumbangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya semakin memberatkan pelaku bisnis perkebunan pada masa mendatang sehingga situasi ini tidak akan kondusif untuk mengembangkan subsektor perkebunan.

Hal lain yang masih terkait dengan otonomi daerah adalah belum jelasnya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan daerah. Kondisi ini sering membingungkan dan mengkhawatirkan pelaku bisnis yang ingin melakukan investasi pada subsektor perkebunan. Pembagian wewenang ini perlu segera diterjemahkan dan disosialisasikan, sehingga pelaku bisnis tidak dihinggapi rasa kekhawatiran untuk melakukan kegiatan bisnis di subsektor perkebunan.

## **Isu Lingkungan**

Pengembangan tanaman perkebunan, kelapa sawit khususnya, akhir-akhir ini mendapat sorotan karena dianggap merusak lingkungan. Memasuki awal abad 21, masalah lingkungan masih akan tetap mendapat tekanan, khususnya dari kalangan LSM lingkungan. Ada beberapa argumen yang digunakan untuk menyatakan perluasan areal perkebunan dapat merusak lingkungan. Pertama, areal perkebunan dianggap berasal dari lahan hutan yang memberi keuntungan ganda pada pengusaha dalam bentuk kayu dan produk perkebunan. Hal ini memang tidak sepenuhnya benar karena banyak juga kebun yang berasal dari lahan yang bukan hutan.

Pengusahaan kebun secara monokultur juga dijadikan argumen lain untuk mendukung kekhawatiran bahwa perkebunan dapat merusak lingkungan. Kasus serangan belalang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat diyakini berkaitan dengan habisnya hutan di wilayah tersebut akibat perkebunan. Masalah banjir juga sering dikaitkan dengan perluasan perkebunan. Situasi tersebut akan mempersulit pengembangan perkebunan pada masa mendatang.

## **Penjarahan**

Masalah lain yang masih harus diselesaikan subsektor perkebunan dalam memasuki awal abad 21 adalah penjarahan, baik itu penjarahan kebun maupun produksi. Masalah ini cukup mengkhawatirkan perusahaan perkebunan, karena masalah ini sudah menyebar lintas wilayah dan komoditas. Nilai kerugian finansial yang ditimbulkan oleh penjarahan ini, walaupun bervariasi bergantung sumbernya, sebenarnya sudah sangat besar. Sebuah laporan menyebutkan bahwa kerugian penjarahan di perkebunan sudah mencapai Rp 5 triliun yang diderita oleh sekitar 120 perusahaan perkebunan (Anonim 2000). Selanjutnya, penyerobotan atau okupasi lahan perkebunan diperkirakan sudah mencapai lebih dari 100 ribu ha. Situasi ini tidak hanya mencemaskan bagi perusahaan yang sudah ada, tetapi juga membuat perusahaan baru membatalkan atau menunda usaha investasi di bisnis perkebunan.

## **PENUTUP**

Sejarah telah mencatat bahwa subsektor perkebunan merupakan suatu agribisnis yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia, termasuk ketika Indonesia mengalami krisis multi-dimensi. Memasuki awal abad 21, peran ataupun beban tersebut tampaknya masih diharapkan dapat diteruskan oleh subsektor perkebunan.

Dalam memikul beban tersebut memasuki awal abad 21, subsektor perkebunan perlu mencermati berbagai perubahan lingkungan strategis ataupun faktor yang mempengaruhi



kinerjanya. Hal-hal tersebut mencakup biaya produksi, harga komoditas perkebunan, liberalisasi perdagangan, peta persaingan, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan, kebijakan fiskal, otonomi daerah, isu lingkungan, dan penjarahan.

Dampak dari perubahan lingkungan strategis secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, perubahan yang pada dasarnya merupakan tekanan terhadap subsektor perkebunan memasuki awal abad ke 21, yaitu kenaikan biaya produksi, tekanan harga komoditas perkebunan, isu lingkungan, dan penjarahan. Kedua, perubahan yang potensial memberi peluang yang lebih besar pada subsektor perkebunan untuk berkembang, yaitu liberalisasi perdagangan yang dilakukan dengan cermat dan kebijakan perdagangan. Ketiga, perubahan yang dampak bersihnya belum jelas seperti perubahan yang berkaitan dengan peta persaingan, kebijakan produksi dan otonomi daerah,

Dengan diklasifikasikannya perubahan lingkungan strategis, maka semua pihak yang terlibat dalam agribisnis perkebunan, seperti pelaku bisnis perkebunan, pemerintah, dan kalangan akademisi, perlu merumuskan berbagai upaya guna meminimumkan dampak negatif dari faktor yang diperkirakan menekan subsektor perkebunan. Selanjutnya, perubahan yang berdampak positif atau dampak bersihnya belum jelas agar dapat diupayakan secara maksimal untuk mengembangkan subsektor perkebunan. Jika hal ini tidak dapat diwujudkan pada awal abad 21 ini, peran subsektor perkebunan yang demikian strategis sebagai penyedia lapangan kerja, sumber devisa, sumber pendapatan, dan sebagai pemacu pertumbuhan di pedesaan, untuk sementara barangkali harus kita tinggalkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. (2000). 'Fenomena penjarahan dan okupasi lahan perkebunan', Media Perkebunan, 34, Juli-Agustus 2000, 15-17.
- Badan Pusat Statistik. (2000). Indikator Ekonomi, September 2000, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Darmawan, T. (2000). Mengapa industri hilir perkebunan Indonesia tidak berkembang?, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Kebijakan Industri Hilir perkebunan, Jakarta, 14 September 2000.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2000). Statistik Tanaman Perkebunan (karet, kelapa sawit, kopi, kakao, dan teh), Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.
- Herman., Fadjar, U., Dradjat, B., (2000). Kajian beberapa alternatif pola pengembangan perkebunan, Laporan Hasil Penelitian, APPI dan Ditjenbun, Jakarta.
- Karseno, A. (2000). Mengapa industri hilir perkebunan Indonesia tidak berkembang?, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Kebijakan Industri Hilir perkebunan, Jakarta, 14 September 2000.

- Pakpahan, A. (1999). Membangun perkebunan Abad 21: membalik arus dan gelombang sejarah, Makalah disajikan pada Lokakarya Model Peremajaan karet Rakyat Secara Swadaya dan Ekspose Teknologi Hasil Penelitian Perkebunan, Palembang, 26-28 Oktober 1999, 54 hal.
- Said, E. G. (2000). Menguak potensi pengembangan industri hilir perkebunan Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Kebijakan Industri Hilir perkebunan, Jakarta, 14 September 2000.
- Sultoni, A. dan Susila, W. R. (1998). 'Perkembangan dan prospek komoditas perkebunan utama Indonesia', dalam Hermanto *et al.* (eds), *Lokakarya Kemitraan Pertanian dan Ekspose Teknologi Mutakhir Hasil Penelitian Perkebunan*, BPTP Ungaran Dan Sekretariat APPI, 178-193.
- Suprihatini, R., Dradjat, B., dan Sulistyono, B. 1996. 'Analisis daya saing teh hitam Indonesia', *Jurnal Pengkajian Agribisnis Perkebunan*, 2(1): 1-7.
- Susila, W. R. (1996). Tekanan yang dihadapi BUMN perkebunan (*Pressures faced government-owned estate crops*), *Kompas*, 13 Maret 1996.
- Susila, W. R. 1998. 'Daya saing komoditas minyak sawit Indonesia', *Jurnal Agribisnis*, II (2); : 16-30.
- Susila, W. R. dan Susmiadi, A. (2000). 'Dampak tarif impor gula terhadap industri gula Indonesia', Hasil penelitian APBN 2000, Sekretariat Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia, Bogor.